

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP  
EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK  
HUNI DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN  
HILIR PROVINSI RIAU**

***THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION ON THE  
EFFECTIVENESS OF SIMPLE HOUSEHOLD DEVELOPMENT IN  
BAGAN SINEMBAH DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT, RIAU  
PROVINCE***

**Desi Kumala Sari<sup>1</sup>, Suhermanudin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup>mandin576@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah belum optimalnya Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel Implementasi Kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni .

Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan teori sebagai alat analisis dari Edward III (1980:10) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber-sumber, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Adapun teori efektivitas digunakan teori dari Goggin et all dalam Soemaryadi (2005:111-113) yang terdiri Tujuan/Hasil (*result*) , Prosedural (*compliance*), Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Implemetasi Kebijakan terhadap efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

**Kata kunci:** Implelementasi Kebijakan, Rumah Layak Huni

**ABSTRACT**

*This research was motivated by the problem of not yet being optimal in the Simple Livable House Assistance Program in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau. This problem is related to one of the Policy Implementation variables which is assumed to have an effect on the Effectiveness of the Simple Livable House Assistance Program.*

*To analyze the problem of this study used theory as an analytical tool from Edward III (1980: 10) which consists of Communication, Sources, Attitudes and Bureaucratic*

*Structure. The effectiveness theory is used the theory of Goggin et all in Soemaryadi (2005: 111-113) which consists of Objectives / Results (Procedure), Procedure (compliance), Monitoring (Monitoring) and Evaluation*

*The method used in this research is explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection uses library research and field studies with data collection techniques using questionnaires, observations, and interviews. The sampling technique used is a simple random sampling. The data analysis technique used is Simple Linear Regression*

*Based on the results of data processing carried out the results of the study showed that there was a positive and significant relationship between Policy Implication on the effectiveness of the Simple Livable House Assistance Program in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency, Riau. Thus the hypothesis proposed in this study is empirically tested.*

**Keywords:** Policy Implementation, Livable Houses

## 1 PENDAHULUAN

Memiliki sebuah rumah yang layak huni merupakan kebutuhan setiap keluarga. Rumah layak huni bukanlah rumah megah dengan fasilitas yang mewah melainkan rumah yang memiliki sanitasi cukup, saluran pembuangan yang memadai, serta sirkulasi udara yang cukup. Pendek kata, walaupun hanya beralaskan semen dan betembok batako, namun jika sudah memenuhi syarat seperti di atas, maka sebuah rumah sudah dapat disebut layak huni. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi dan hasil alam lainnya, namun demikian sampai dengan September 2013 menurut data Badan Statistik (BPS), di Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat penduduk miskin sekitar 9,30% dari seluruh jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat Desa. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat masih banyak yang belum memenuhi standar

layak untuk dihuni, hal tersebut yang menjadi latar belakang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau mengagendakan kebijakan penanganan permasalahan tersebut melalui kebijakan program pengentasan Kemiskinan,

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Kriteria calon Penerima Rumah Layak Huni dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki rumah/memiliki rumah tidak layak huni.
2. Memiliki tanah sendiri atau tanah hibah (dibuktikan dengan surat kepemilikan).
3. Tanah siap bangun.
4. Diutamakan berusia lanjut.

5. Status perkawinan (janda, duda, dan utuh).
6. Tidak memiliki penghasilan tetap (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
7. Berdomisili minimal 5 tahun di desa setempat.

Kecamatan Bagan Sinambah terdiri dari 2 Kelurahan dan 15 Kepenghulu dimana penduduk di Kecamatan tersebut mayoritas berprofesi sebagai petani, yang sebagian dari masyarakatnya belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. Untuk terselenggaranya program Rumah Sederhana Layak Huni di Kelurahan dan Kepenghulu tersebut, Camat Bagan Sinambah berkoordinasi dengan Lurah dan Penghulu.

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Kelurahan/Kepenghulu ditetapkan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang difasilitasi oleh Lurah/Penghulu meliputi :

1. Penetapan Kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKMAS).
2. Mengusulakan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
3. Membantu memfasilitasi dan memantau kelancaran program dan menyelesaikan masalah yang timbul di wilayahnya.

Namun kenyataannya, berdasarkan peninjauan awal melalui observasi lapangan, peneliti mendapat informasi dari salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Bagan Sinambah, menyebutkan bahwa penerima bantuan program Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinambah Kabupaten Rokan Hilir tidak

sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. program bantuan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinambah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 dilihat dari aspek sasaran, aspek tepat waktu, dan tepat mutu belum efektif. Adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dalam program pembangunan rumah layak huni sebagaimana ditetapkan dalam Kriteria calon Penerima Rumah Sederhana Layak Huni dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Indikasi-indikasi lain yang belum efektif dalam bantuan program pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Bagan Sinambah Kabupaten Rokan Hilir antara lain sebagai berikut :

1. Kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program pembangunan rumah layak huni. Hal ini terlihat dari data penerima program rumah layak huni, jika dilihat dari usia dimana seharusnya yang diprioritaskan usia lanjut tetapi dalam realisasinya penerima bantuan usia muda (Usia <40 Tahun).
2. Tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni.
3. Belum tersedianya media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Adanya keberpihakan terhadap penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni.
5. Laporan pertanggungjawaban terhadap fisik dan keuangan tidak dilaporkan secara berkala oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat) kepada Lurah/Penghulu.

Untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, peneliti menghubungkan dengan Implementasi Kebijakan. Karena asumsi sementara peneliti bahwa Pembangunan rumah sederhana layak huni bisa efektif apabila kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Implementasi Kebijakan

Meter dan Horn dalam Winarno (2002:146) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai :“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya”.Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustiono, (2006:153-154) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

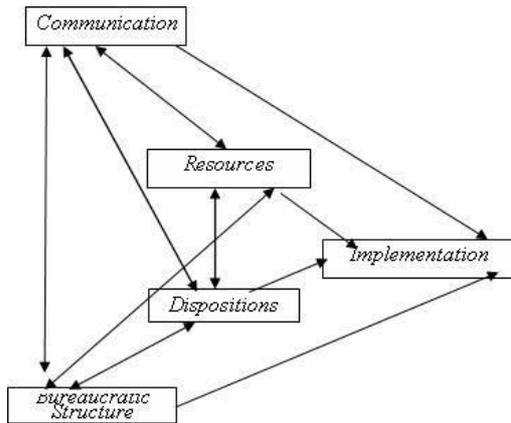
“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implemmentasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal, yaitu ; (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan. (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### 2.2. Dimensi Dimensi Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan *George C. Edward III* mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni : *Communication; resources; disposition or attitude;* dan *bureaucratic structure*. Lebih lanjut dikemukakan Edwards III (1980:147-148) keempat faktor tersebut masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain, juga secara langsung mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Pada gambar berikut menjelaskan interaksi antar keempat faktor sebagaimana dimaksudkan Edaward III tersebut.



**Gambar 2.3**

**Dampak Langsung dan Tidak Langsung Pada implementasi**

**Sumber: Winarno.2005:208**

Keempat faktor tersebut mirip dengan model Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2004:125-135).

1. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Oleh karna itu syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.

2. Sumber-sumber

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan faktor, meliputi : staf yang memadai, serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk

menterjemahkan usul-usul di atas kertas, guna melaksanakan pelayanan faktor yakni : staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

3. Sikap Pelaksana ( kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku )

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan factor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hak ini berarti adanya dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, ini berbicara tentang dampak baik positif maupun negatif.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah factor dalam kehidupan modern. Oleh karena itu struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur

birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*Standard Operating Procedures* - SOP) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi, interest group, pejabat-pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya.

Pengertian tersebut diatas, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan tupoksi aparat pemerintah harus terlebih dahulu memahami dan menerima tujuan dan nilai organisasi, dan yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami. Dan untuk mempermudah penyerapan pelaksanaan kebijakan harus didukungnya dengan pegawai-pegawai yang memadai yang mempunyai keahlian dibidangnya sehingga aparat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### **2.3 Pengertian Efektivitas**

Pengertian dasar dari efektivitas berasal dari kata efektif (hasil guna), karena pada akhirnya bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh konsep efektivitas (*effectiveness*). Setiap kegiatan manajemen dalam organisasi ditujukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, dimana dengan efektivitas yang tinggi segala apa yang direncanakan dapat dicapai, baik dari sudut kualitas, kuantitas maupun waktu.

Pengertian efektivitas, banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Hutapea dalam Sedarmayanti (2001: 98), yang menyatakan sebagai berikut: "Efektivitas

berasal dari kata efek, yang berarti mempunyai pengaruh yang besar dan tepat, memberikan perubahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Efektif titik beratnya adalah tepat sasaran, berarti dengan input yang tersedia dapat mencapai output yang direncanakan".

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sedarmayanti (2009: 59) pengertian efektivitas yaitu: "Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat".

Sebagai teori pemecah masalah untuk variabel terikat dalam penelitian ini peneliti mencoba menerapkan Pendapat yang di sampaikan oleh Goggin et.al dalam Sumaryadi (2005:111-113) Pelaksanaan kebijaksanaan dapat dikatakan efektif apabila terjadi efektivitas sesuai dengan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Tingkat Prosedural (*compliance*), yaitu semua aktivitas implementasi yang dijalankan oleh implementor (pelaksana) sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dan autoratif dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
2. Tujuan/hasil (*result*) yaitu menyangkut tujuan dan persoalan dasar (substansial) yang hendak dipecahkan melalui kebijaksanaan (problem solving oriented).
3. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi, artinya untuk mengetahui bagaimana suatu program berjalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*monitoring*). Dan untuk mengetahui perkembangan baik menyangkut kemajuan maupun kendala-kendala yang dihadapi, sehingga dapat diketahui sejauhmana suatu program telah memberikan hasil atau manfaat nyata kepada masyarakat.

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Mengacu pada teori pemecah masalah tersebut di atas, peneliti berharap bahwa dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dapat efektivitas melalui Tingkat Prosedural (*compliance*), Tujuan/hasil (*result*), serta Pelaksanaan (*monitoring*) dan evaluasi sehingga pelaksanaan Program Rumah Layak Huni dapat berjalan secara optimal.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumber-Sumber, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi”.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanasi (*Explanatory Research*) yang dimana data informasi dapat dikumpulkan dari populasi, yang hasil datanyadikumpulkan dan dianalisis untuk dapat mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah *Koefisien Korelasi Rank Spearmen*.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana dilakukan untuk mengetahui perubahan variabel bebas dalam hal ini adalah Variabel Implementasi Kebijakan akan mempengaruhi variabel tidak bebas dalam hal ini Variabel Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau. Adapun hasil perhitungan persamaan Regresi Linear Sederhana

dengan menggunakan SPSS V.21 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,144	1,892		3,247	,002
Implementasi Kebijakan	,619	,051	,831	12,063	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni

Sumber : Pengolahan SPSS, 2016

Dari tabel di atas akan dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,144 + 0,619X$$

Dimana :

X = Variabel Implementasi Kebijakan

Y = Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni

Persamaan Regresi tersebut memperlihatkan bahwa apabila Implementasi Kebijakan terjadi kenaikan satu satuan, maka Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni akan terjadi kenaikan sebesar 0,619 satuan. Kemudian konstanta yang bernilai 6,144 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan terhadap variabel Implementasi Kebijakan maka Variabel efektivitas program bantuan rumah sederhana layak huni akan berubah sebesar 6,144 satuan.

#### 4.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh akan dihitung nilai Koefisien Determinasi dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Koefisien Determinasi (KD)} = r^2 \times 100\%$$

$$= (0,836)^2 \times 100\%$$

$$= 0,6989 \text{ atau } 69,89 \%$$

Ini memperlihatkan bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan terhadap Variabel Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni adalah sebesar 69,89% dan sisanya sebesar 30,11% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang tidak diteliti.

#### 4.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0 : \rho \neq 0$  Tidak terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau

$H_a : \rho = 0$  Terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau

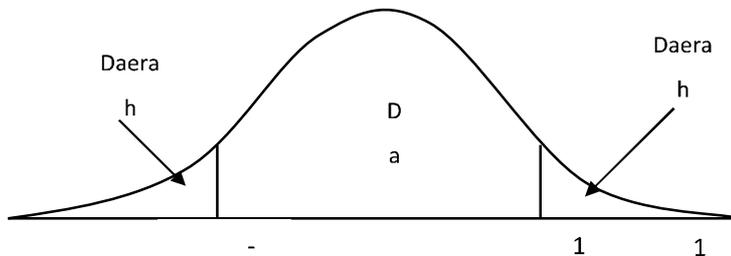
$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

$$t = 0,836 \sqrt{\frac{67-2}{1-0,836^2}}$$

$$t = 12,283$$

Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,9971. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 12,283 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,9971 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Kurva Penerimaan  $H_a$  dan Penolakan  $H_a$**

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 12,283 berada pada daerah penerimaan  $H_a$ , artinya bahwa t tabel lebih besar dari t hitung, atau  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

5.1.1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara Implementasi Kebijakan Terhadap

Variabel Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau mempunyai hubungan sebesar 0,836 pada taraf uji  $\alpha = 0.05$  dan menurut Sugiyono (2002:216) angka ini menunjukkan hubungankuat. Pengaruhnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 0,836, dimana  $t_{tabel}$  sebesar 1,9971 masih lebih kecil dari harga  $t_{hitung}$  sebesar 12,283 sehingga hipotesis penelitian ini dapat diterima.

5.1.2. Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Program Bantuan Rumah

Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau tidak terlepas kaitannya dengan implementasi kebijakam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan terhadap efektivitas Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada tim pelaksana kegiatan program bantuan rumah sederhana layak huni dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
2. Disarankan kepada Aparat Kecamatan Bagan Sinembah seharusnya selalu mensosialisasikan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni agar masyarakat dikecamatan tersebut mengetahui adanya bantuan tersebut dan lebih memperhatikan kriteria-kriteria dalam penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Anderson, James E.2006. *Public Policy Making, Sixth Edition*, Boston : Houghton Mifflin Company.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Surabaya : Erlangga.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P, 1995, *Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta

### Dokumen :

- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa.